

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah di bidang desentralisasi dan otonomi daerah dimulai sejak keluarnya UU No.22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 32/2004 yang isinya memuat pengakuan eksistensi masyarakat adat secara politik tetapi dalam implementasinya justru menimbulkan banyak persoalan. Berbagai kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan, negara secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil-alih hak asal-usul, hak atas wilayah adat, hak untuk menegakkan sistem nilai, ideologi dan adat istiadat, hak ekonomi, dan yang paling utama adalah hak politik masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka yang khas.

Proses peminggiran hak terhadap pembangunan bagi masyarakat adat berlangsung semenjak dimulainya pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan terus berlangsung hingga Orde Reformasi. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah dan korporasi menyangkut permasalahan penguasaan sumberdaya alam, hak ulayat, serta hak ekonomi, sosial dan politik masyarakat adat.

Atas nama "pembangunan" sebagai stempel kebijakan pemerintah seolah-olah semua proses marginalisasi terhadap masyarakat adat menjadi sah dan mendapatkan legitimasi untuk mengabaikan hak-hak asasi masyarakat adat. Berbagai kebijakan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri di tingkat nasional sampai dengan Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah di era otonomi terus menggerus hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat adat.

Pada era reformasi kebijakan politik pemerintah di sektor kehutanan dengan terbitnya UU No.41/1999, dari berbagai studi yang dilakukan justru menciptakan, memperluas, dan mempertajam terjadinya konflik di sektor kehutanan.<sup>1</sup> Data hasil studi CIFOR dan FWI frekuensi konflik pada tahun 2001 dan 2002

---

<sup>1</sup> Lebih jauh lihat <http://septiaku.multiply.com/journal/item/101> diakses pada 15 October 2009 1.14 WIB.

cenderung menurun, tetapi masih dua kali lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 1997. Dari 359 peristiwa konflik yang tercatat pada tingkat nasional, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 27% di areal HPH, dan 34% di kawasan konservasi. Penyebab terjadinya konflik kehutanan antara lain adalah kebijakan tentang “perubahan status kawasan hutan” menjadi “kawasan konservasi” telah menyulut beberapa rangkain konflik di sekitar kawasan konservasi taman nasional di Indonesia antara pemerintah dan korporasi dengan masyarakat adat (Galudra, 2006; Accioli, 2001; ARD, 2004; Kleden, 2004, Pangewang, 2009).

Konflik terhadap akses sumberdaya alam yang dikemukakan diatas juga terjadi pada masyarakat adat Orang Rimba di Provinsi yang telah berlangsung sejak era Orde Baru. Konflik berawal dari semakin terkurasnya sumberdaya alam hutan sebagai tempat hidup Orang Rimba yang beralih fungsi menjadi kawasan HPH, HTI, perkebunan besar, dan kawasan pemukiman transmigrasi.

Lajunya proses kehilangan hutan (*deforestrasy*) di Provinsi Jambi telah dimulai pada dasawarsa tahun 70-an dengan kebijakan pemerintah disektor kehutanan memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada lebih kurang 28 perusahaan yang melakukan eksploitasi kawasan hutan Provinsi Jambi dengan total luas konsesi sekitar 2,6 juta hektar. Sebanyak 14 perusahaan diantaranya bersinggungan langsung dengan kawasan penghidupan Orang Rimba. Awal dekade tahun 80-an pemerintah dengan dukungan Bank Dunia memulai program transmigrasi besar-besaran di kawasan hutan dataran rendah Provinsi Jambi, yang menyebabkan terjadinya konversi areal kawasan hutan menjadi areal pemukiman dan lahan-lahan pertanian dalam jumlah yang sangat luas.<sup>2</sup> Bersamaan dengan pembukaan pemukiman transmigrasi dikembangkan pula perkebunan-perkebunan dengan pola kemitraan inti-plasma dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Orang Rimba atau yang dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu etnik tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Masyarakat umum lebih mengenal kelompok Orang Rimba sebagai Orang Kubu. Istilah kubu

---

<sup>2</sup> Robert Aritonang, Hutan Dataran Rendah Provinsi Jambi dan Kehidupan Orang Rimba, Bulletin Alam Sumatera edisi 1/VIII Juli, KKI-WARSI,2009.

juga menjadi nama internasional bagi Orang Rimba. Hal ini disebabkan peran para etnographer Belanda pada awal abad ini yang selalu menyebut Orang Rimba sebagai Orang Kubu dalam tulisan-tulisan mereka. Sebutan orang Rimba lebih disukai kelompok etnis ini, sebutan yang membedakan identitas mereka dengan orang Terang, sebutan orang Rimba untuk masyarakat lain yang tinggal diluar hutan.

Sesuai dengan sebutannya “Orang Rimba”, keberadaan mereka memang lebih banyak di dalam hutan dataran rendah Provinsi Jambi dan selalu hidup berpindah-pindah (*nomaden*), meskipun sekarang ada yang sudah mulai menetap dalam bahasa mereka disebut “*bediom*”. Keberadaan hutan bagi Orang Rimba bukan sekadar sebagai prasyarat bagi kebutuhan dasar dan kehidupan ekonomi mereka. Lebih dari itu hutan merupakan sumber sosial budaya bagi komunitas adat Orang Rimba. Orang Rimba saat ini mengalami proses marginalisasi sejalan dengan lajunya deforestasi hutan di Provinsi Jambi, maka salah satu ancaman paling serius bagi komunitas masyarakat adat Orang Rimba adalah ancaman terhadap eksistensi kehidupan mereka.

Seluruh proses pembangunan tersebut diatas berakibat hilangnya sumberdaya hutan dan tanah kawasan hidup masyarakat adat Orang Rimba. Alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menghancurkan harta kekayaan sumberdaya hutan yang menjadi sumber kehidupan Orang Rimba. Kawasan hutan dataran rendah kaya dengan beraneka ragam jenis rotan, getah-getahan, jernang, buah-buahan, umbi-umbian dan hewan buruan hilang dengan adanya pembukaan kawasan dan beralih menjadi tanaman yang monokultur yang sangat miskin sumberdaya yang bisa mendukung kehidupan Orang Rimba. Dampak akhir dari semua proses adalah terjadinya kemiskinan struktural bagi komunitas adat Orang Rimba.

Kebijakan “pembangunan” yang dilakukan pemerintah dan korporasi berupa pembangunan sarana transportasi jalan, pemukiman transmigrasi, pembukaan kawasan perkebunan, pembukaan pertambangan, dan pembukaan kawasan HTI turut berkontribusi secara signifikan menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat adat Orang Rimba dengan pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal/pendatang. Dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan

eksistensi dan aspirasi masyarakat adat Orang Rimba telah mengakibatkan terjadinya perlawanan fisik, relokasi pemukiman, kehilangan sumber penghidupan, tercerabutnya nilai-nilai kearifan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat, konflik horizontal dengan masyarakat lokal dan pendatang serta terjadinya proses marjinalisasi hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat adat.

Keberlanjutan kehidupan komunitas masyarakat adat Orang Rimba saat ini mengalami tekanan secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat desa, pihak swasta dan pemerintah. Berbagai aktifitas pembukaan lahan dan kegiatan ekonomi ekstraktif terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah hidup komunitas orang Rimba yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pihak swasta telah menyebabkan marjinalisasi kehidupan orang Rimba, demikian pula dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan pusat yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya orang Rimba justru menyebabkan terjadinya eksklusi sosial dan menutup akses mereka terhadap sumber penghidupan dan manfaat pembangunan itu sendiri yang berakibat pada penurunan kualitas hidup dan terjadinya kemiskinan struktural bagi komunitas masyarakat adat Orang Rimba.

Kondisi keberlanjutan kehidupan komunitas Orang Rimba mengalami tekanan dari berbagai pihak sebagai dampak dari proses pembangunan, meskipun demikian sampai saat ini komunitas masyarakat adat orang Rimba masih dapat terus bertahan hidup meskipun dengan kondisi yang marjinal baik secara ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Keberlangsungan hidup pada kondisi marjinal ini tidak dapat ditolerir dalam jangka waktu ke depan. Berbagai dampak negatif dari kondisi marjinal telah muncul antara lain potensi konflik dengan warga desa dan perusahaan perkebunan karena Orang Rimba sering mengumpulkan benda apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk sekedar bertahan hidup, meskipun kadang dengan mencuri yang menjadi pemicu konflik. Hal ini telah menyebabkan warga desa resah dengan kehadiran kelompok Orang Rimba.

Dampak negatif lainnya adalah beberapa kelompok kecil Orang Rimba yang tinggal di dekat kota sudah menjadi pengemis dan pemulung barang bekas di Kota

Kabupaten dan Provinsi, mereka terkadang tidak segan menghentikan kendaraan yang lewat di jalan lintas Sumatera dan meminta uang dan makanan.

Kondisi kehidupan Orang Rimba yang marginal dan adanya berbagai dampak sosial dari keberadaan Orang Rimba menarik penulis untuk mengkaji lebih jauh permasalahan dan kesenjangan sosial yang terjadi di komunitas adat Orang Rimba. Faktor lain yang melatar belakangi adalah belum optimalnya program pembangunan yang diperuntukkan bagi Orang Rimba sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka mendorong penulis untuk melakukan kajian terhadap strategi kebijakan pembangunan yang diterapkan bagi pembangunan Orang Rimba. Alasan akademis adalah adanya konsep “pembangunan sosial” yang dapat berguna mengatasi permasalahan dan kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

## **1.2. Fokus Permasalahan**

Pembangunan infrastruktur jalan lintas Sumatera, pembangunan pemukiman transmigrasi, pembukaan lahan perkebunan dan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi disatu sisi menimbulkan dampak terjadinya pertumbuhan ekonomi, sementara disisi lain telah mengakibatkan terjadinya degradasi hutan dataran rendah yang sangat signifikan.

Degradasi kawasan hutan berakibat negatif bagi masyarakat adat Orang Rimba yaitu hilangnya sumber-sumber kehidupan dan wilayah ruang hidup mereka. Kondisi ini menimbulkan konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam antara pihak korporasi dan orang Rimba. Lima tahun terakhir konflik pemanfaatan sumber daya hutan tidak saja terjadi antara komunitas adat orang Rimba dengan pihak korporasi tetapi dinamika konflik telah berkembang secara horisontal yaitu antara masyarakat adat Rimba dengan masyarakat desa asli dan masyarakat transmigrasi, yang melakukan aktifitas pembukaan hutan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) yang merupakan tempat pemukiman orang Rimba. Adanya aktifitas pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar menyebabkan ruang hidup orang Rimba semakin sempit dan sumber-sumber penghidupan orang Rimba semakin berkurang atau telah hilang sama sekali.

Dalam posisi tertekan sedemikian rupa, komunitas adat orang Rimba memiliki posisi yang lemah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali.

**Universitas Indonesia**

Pembangunan perkebunan kelapa sawit, kawasan HTI dan pemukiman transmigrasi oleh pihak pemerintah dan korporasi di wilayah yang dulunya diketahui dan diakui oleh masyarakat desa sebagai wilayah adat orang Rimba, namun hak adat tersebut tidak diakui dan tidak diakomodir dalam peraturan yang dimiliki oleh negara, sehingga proses pemberian izin pembangunan perkebunan dan HTI menjadi kekuasaan mutlak pemerintah untuk diberikan kepada pihak korporasi.

Meskipun dalam UU No.32/2002 telah mencoba mengakui eksistensi masyarakat adat orang Rimba namun dalam implementasinya dilapangan tidak berjalan dengan baik. Sehingga berdampak terjadinya pengabaian akan hak-hak asasi masyarakat adat Orang Rimba antara lain pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental serta hak-hak lainnya.

Pemerintah telah melakukan upaya pembangunan bagi masyarakat adat orang Rimba melalui program-program di sektor pendidikan, perumahan dan kesehatan. Namun upaya tersebut belum dapat meningkatkan taraf kesejahteraan bagi orang Rimba. Hal ini disebabkan program yang dilaksanakan pemerintah tidak mencapai sasaran dengan optimal dan strategi kebijakan yang diterapkan kurang memperhatikan kondisi sosial budaya Orang Rimba. Contohnya program pemukiman kembali orang Rimba, dengan membangun rumah tempat tinggal. Perumahan ini pada akhirnya ditinggalkan oleh orang Rimba setelah jatah hidup sebagai bagian transmigran lokal tidak diberikan lagi, mereka pergi dengan alasan berburu dan meramu kedalam hutan untuk mencari makanan, atau karena proses "*melangun*" yaitu meninggalkan tempat bermukim dikarenakan ada yang meninggal dunia atau ada dari anggota kelompok yang sedang sakit parah.

Disektor kesehatan ada program ASKESKIN dan JAMKESMAS, yang telah diterima sebagian kecil kelompok orang Rimba yang menjadi kelompok sasaran program, tetapi program ini tidak menjawab permasalahan tingginya

angka kematian ibu dan anak dan rendahnya angka harapan hidup Orang Rimba.<sup>3</sup> Begitu pula halnya program di sektor pendidikan, selain minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, akses bagi anak-anak orang Rimba untuk mengikuti pendidikan dasar masih sangat terbatas, hal ini ditunjukkan dengan jumlah anak orang Rimba yang bersekolah masih sangat rendah.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisis proses pembangunan sosial pada sektor pendidikan, kesehatan, perumahan bagi masyarakat adat Orang Rimba yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan dampak kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, terhadap proses marginalisasi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat adat Orang Rimba.

Untuk itu diperlukan kajian evaluasi terhadap model dan strategi pembangunan yang telah diterapkan pemerintah terhadap masyarakat adat orang Rimba termasuk dampaknya bagi kehidupan komunitas adat orang Rimba. Dilain pihak juga perlu dilakukan pemetaan sosial masyarakat adat orang Rimba sehingga akan diperoleh gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek sosial masyarakat adat Rimba dalam proses adaptasi terhadap kebijakan pembangunan yang ditelah diterapkan dan perubahan lingkungan yang terjadi, hasil pemetaan ini diharapkan akan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan sosial dan kebijakan lainnya bagi masyarakat adat orang Rimba.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini bermaksud melakukan kajian model dan strategi pembangunan yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap komunitas adat orang Rimba. Kemudian menjelaskan berbagai dampak pembangunan yang telah diterapkan tersebut.

Selanjutnya tujuan pokok penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat dituangkan dalam sub tujuan penelitian sebaga berikut :

<sup>3</sup> <http://oase.kompas.com/read/xml/2009/03/18/0136059/kesehatan.orang.rimba.terancam> diakses pada tanggal 21 Juli 2009 13.38 Wib.

<sup>4</sup> Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.warsi.or.id](http://www.warsi.or.id); [http://beritasore.com/2008/12/30/orang-rimba-di-luar-tnbd-harus-diseleamatkan/diakses\\_21\\_Juli\\_2009\\_13.45Wib](http://beritasore.com/2008/12/30/orang-rimba-di-luar-tnbd-harus-diseleamatkan/diakses_21_Juli_2009_13.45Wib); <http://www.mapalaui.info/2006/07/18/orang-rimba-masyarakat-terasing-yang-semakin-termarginalisasi/> ?cp=1 di akses 23 Juli 2009 07.15 Wib.

1. Melakukan pemetaan sosial masyarakat adat orang Rimba untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi adaptasi komunitas adat orang Rimba dalam merespon kebijakan pembangunan dan perubahan lingkungan dari aspek sosial yang meliputi komponen demografi, ekonomi, budaya dan ekologi masyarakat adat orang Rimba.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan model-model dan strategi program pembangunan sosial yang telah dilakukan maupun yang ideal seharusnya dilakukan dalam pembangunan sosial komunitas masyarakat adat Orang Rimba.

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pembangunan sosial dan keberlanjutan kehidupan komunitas orang Rimba dalam kondisi mengalami tekanan dan marginalisasi dari proses pembangunan oleh masyarakat desa, pihak korporasi dan pemerintah. Untuk itu *grandtour* dalam penelitian ini ingin menganalisis lebih dalam bagaimana strategi kebijakan pembangunan sosial bagi masyarakat adat orang Rimba? yang dapat kepentingan dan membuka akses partisipasi dan peran komunitas masyarakat adat orang Rimba terhadap pembangunan.

Selanjutnya pertanyaan *grandtour* tersebut diturunkan menjadi pertanyaan *minitour* sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik sosial budaya, ekonomi, ekologi, demografi dan politik komunitas masyarakat adat orang Rimba?
2. Bagaimana pola dan strategi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat adat orang Rimba? Mengapa pola dan strategi yang telah diterapkan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat orang Rimba?
3. Bagaimana model pembangunan sosial sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan masyarakat adat orang Rimba yang lebih relevan dengan kondisi sosial budaya, ekonomi dan ekologi komunitas adat orang Rimba?

#### **1.5. Signifikansi Penelitian**

##### **a. Signifikansi Akademis**

- 1) Menjadi masukan secara ilmiah tentang pentingnya peran pembangunan sosial terhadap komunitas masyarakat adat orang Rimba.
- 2) Menjadi masukan secara ilmiah bagi pengembangan disiplin ilmu Sosiologi Pembangunan, khususnya pembangunan sosial komunitas adat orang Rimba
- 3) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembangunan sosial masyarakat adat.

**b. Signifikansi Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi perencanaan pembangunan sosial komunitas masyarakat adat.
- 2) Hasil penelitian berupa rencana strategis pembangunan sosial komunitas orang Rimba dapat menjadi masukan bagi badan perencana pembangunan daerah dalam menyusun program pembangunan sosial bagi komunitas adat orang Rimba.

**1.6. Sistematika Penulisan Laporan**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang; fokus permasalahan; tujuan penelitian; pertanyaan penelitian; signifikansi penelitian; dan sistematika penulisan laporan.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisi Konsep Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba; Konsep Pengembangan Masyarakat Adat Orang Rimba; Aspek Sosial Budaya Masyarakat Adat Orang Rimba; Perspektif Perubahan Sosial Orang Rimba dan Pembangunan; Proses dan Strategi Adaptasi Sosial Budaya; Kerangka Pemikiran Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba.

**BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri atas Pemilihan Lokasi dan Perodesasi Penelitian; Prosedur Penelitian; Strategi Penelitian; Batas dan Pembatasan Penelitian; Unit Analisis dan Subjek Penelitian; Pengumpulan Data; Analisa Data; Reliabilitas dan Validasi Data; dan Operasional Konsep Penelitian.

**BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yaitu Karakteristik Daerah Penelitian; Karakteristik Sosial, Budaya, dan Ekonomi Orang Rimba ; Aspek Budaya Orang Rimba; Sistem Ekonomi Orang Rimba ; Aspek Politik Orang Rimba; Identifikasi Masalah dan Isu Penting Terkait Masyarakat Adat Orang Rimba; Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sosial Pemerintah Bagi Orang Rimba; Analisis Teoritik Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba.

**BAB V. PEMBANGUNAN SOSIAL MASYRAKAT ADAT ORANG RIMBA**

Bab ini berisi Perspektif dan Pendekatan Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba ; Prinsip-prinsip Pembangunan Sosial Orang Rimba; Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Sosial; dan Model Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba

**BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian kualitatif mengenai pembangunan sosial orang Rimba dan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan komunitas dan relevansi terhadap penyusunan program pembangunan sosial bagi orang Rimba.